

Transisi Ekonomi Wilayah Kabupaten di Jawa Tengah dan Keterkaitannya dengan Perkembangan Ekonomi Lokalnya

N. A. Adni¹, J. S. Setyono²

^{1,2}Universitas Diponegoro, Indonesia

Article Info:

Received: 29 October 2016

Accepted: 29 October

Available Online: 3 November
2017

Keywords:

Transition, Economic Structure,
Local Economic, Central Java

Corresponding Author:

Authors Nisa Ayunda Adni
Diponegoro University,
Semarang, Indonesia
Email: nisa.ayunda@gmail.com

Abstract: *Central Java economic development has been dynamic and diverse. The economy of the region has grown gradually and experienced structural transition. The regional economy which was originally based on the primary sector has transformed to a more modern one which the secondary and tertiary sectors start to dominate the economy. While the growth of the regional economy is widely believed to be caused mainly by exogenous factors, there has been tendency the emergence of local economic factors. This research aims to examine the possible relationship between economic transition and the persistence of local economic development factors among districts in Central Java. This study applies quantitative descriptive analysis combining the methods of scoring analysis, weighted analysis and correlation analysis together to explore the relationship. The research shows that in general there is positive relationship between economic growth and local economic development indicators. This result can contribute to fostering local factors as part of regional and local economic development policies for the region.*

Copyright © 2016 TPWK-UNDIP

This open access article is distributed under a

Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

Adni, N. A., & Setyono, J. S. (2016). Transisi Ekonomi Wilayah Kabupaten di Jawa Tengah dan Keterkaitannya dengan Perkembangan Ekonomi Lokalnya. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Dan Kota)*, 5(4), 292–306.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2006). Selama ini, pembangunan identik dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena perkembangan wilayah pada dasarnya adalah wujud fisik perkembangan ekonomi (Fiman, 1996). Sehingga untuk mengukur perkembangan wilayah dapat menggunakan indikator ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Sirojuzilam, 2008).

Pembangunan atau kegiatan modernisasi yang dilakukan mengakibatkan aktivitas perekonomian di berbagai wilayah di Indonesia semakin beragam dan dinamis. Dimulai dengan kemunculan aktivitas ekonomi baru diiringi dengan berkembangnya aktivitas ekonomi yang sudah ada. Pertumbuhan sektor industri dan jasa semakin pesat. Namun, sektor pertanian yang pada awalnya dominan, produktivitasnya menjadi semakin menurun. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya transisi ekonomi, yaitu perubahan struktur ekonomi tradisional (sektor pertanian) menuju ekonomi modern (sektor industri atau jasa).

Transisi ekonomi juga menjadi salah satu indikator yang biasanya digunakan oleh lembaga internasional untuk mengetahui adanya pembangunan dan perkembangan ekonomi. Indonesia yang dulunya merupakan negara agraris, saat ini sebagian besar wilayahnya sudah mengalami industrialisasi.

Dalam pembangunan regional dikenal dua model pembangunan berdasarkan faktor produksinya yaitu pembangunan eksogen dan pembangunan endogen. Pembangunan eksogen merupakan istilah yang digunakan dalam mengungkapkan pembangunan modernisasi atau westernisasi (Jan, 2001). Dalam pembangunan eksogen, faktor-faktor yang berperan dalam pembangunan terdapat di luar daerah. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pengaruh luar tersebut akan berdampak pada modal sosial dan budaya lokal yang harusnya dijaga tradisinya. Kritik tersebut kemudian melatarbelakangi kemunculan model pembangunan endogen. Sedangkan faktor endogen meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal sedangkan faktor-faktor eksogen adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut (Glasson, 1990). Konsep pembangunan endogen sering dikaitkan dengan proses industrialisasi endogen (peusahaan lokal). Selain itu, pembangunan endogen mensyaratkan adanya kapasitas masyarakat lokal (Names, 2005).

Indonesia merupakan negara yang pembangunannya bersifat eksogen dan endogen. Dalam era globalisasi saat ini, pembangunan eksogen akan lebih dominan perannya. Terlebih lagi Indonesia juga merupakan anggota organisasi internasional. Sehingga pengaruh faktor luar akan mudah mempengaruhi pembangunan di Indonesia. Teknologi, sumber daya, dan budaya luar akan masuk. Dikhawatirkan hal tersebut dapat mempenagaruhi keaslian budaya lokal dan pertumbuhan wilayah tidak berlangsung secara berkelanjutan karena tidak disesuaikan dengan karakteristik lokal. Untuk menyeimbangi hal tersebut, Indonesia juga melakukan pembangunan endogen. Salah satu bentuk dari pembangunan endogen di Indonesia adalah pembanguna ekonomi lokal. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) suatu proses dimana sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal menjalin kerjasama untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya potensial yang dimiliki (sumber daya manusia, alam dan sosial) di dalam masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely, 1994).

Jawa Tengah, merupakan salah satu provinsi yang mengalami pembangunan yang pesat. Kegiatan pembangunan di Jawa Tengah menghasilkan peningkatan produktivitas PDRB secara keseluruhan. Jika dilihat dari struktur ekonominya, laju pertumbuhan sektor pertanian Jawa Tengah semakin menurun tetapi sektor industri dan jasa cenderung meningkat. Sektor industri pengolahan di Jawa Tengah masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Jawa Tengah yaitu sebesar 32,89 persen, sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang juga merupakan sektor dominan memberikan sumbangan bagi perekonomian Jawa Tengah sebesar 19,58 (BPS, 2011). Fakta tersebut didukung dengan hasil penelitian Pambudi (2010) yaitu kontribusi sektor industri mengalami penurunan, sektor perdagangan cenderung mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB dan sektor primer mengalami penurunan selama tahun 2004-2008. Meskipun mengalami penurunan, sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa Jawa Tengah mengalami transisi ekonomi akibat adanya pembangunan, yaitu dengan bukti penurunan sektor primer dan peningkatan sektor sekunder dan tersier.

Di sisi lain, sejak tahun 2001 pemerintah Jawa Tengah juga melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Karena ekonomi lokal merupakan salah satu penggerak roda perekonomian daerah yang perannya cukup besar. Selain itu, ekonomi lokal ini merupakan bentuk ekonomi kerakyatan, karena menitik beratkan pada sumber daya lokal, ketrampilan, pengetahuan dan inisiatif penduduk lokal. Sehingga program pembangunan ini disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik daerah tersebut. Sehingga tidak dikhawatirkan akan merubah budaya dan tradisi, serta dapat terjamin keberlanjutannya. Pendapat Names (2005) mengenai pembangunan endogen yang mensyaratkan munculnya industri endogen/ lokal. Selain itu Coffey dan Polese (1984) mengatakan bahwa perkembangan ekonomi lokal dilihat dari perkembangan perusahaan lokalnya, kewirausahaan lokal juga dapat dijadikan variabel kedua yang mendasari perkembangan wilayah.

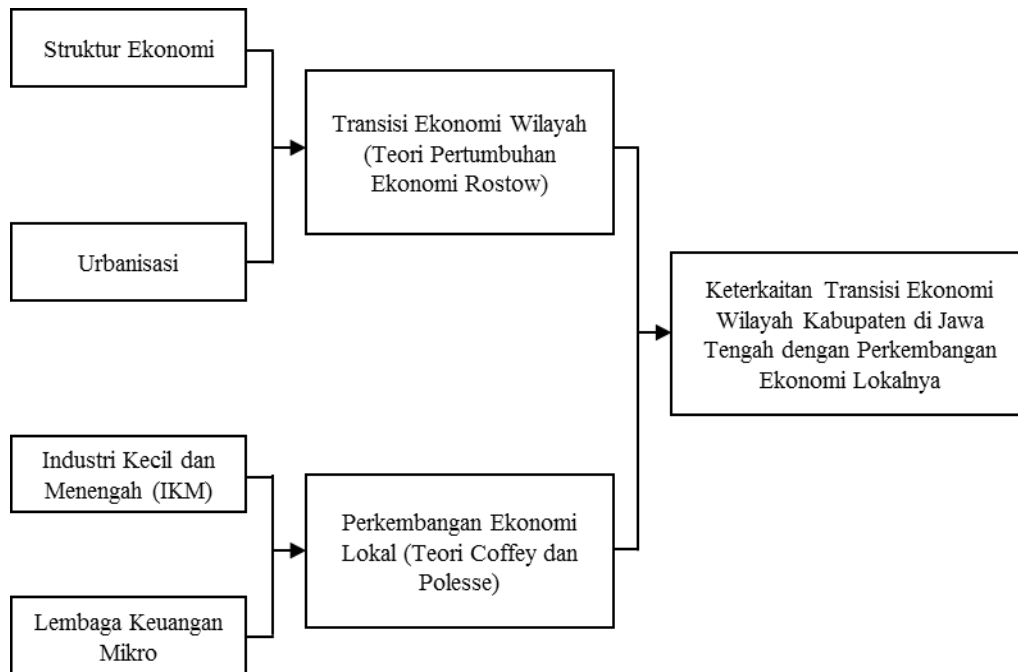
Di Indonesia, perusahaan lokal identik dengan industri kecil dan menengah (IKM). Jumlah IKM di Jawa Tengah semakin bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan Jawa Tengah jumlah IKM binaan tahun 2001 yaitu 40.816 unit menjadi 41.968 unit pada tahun 2002. Jumlah aset IKM juga meningkat dari Rp. 2,938 Triliun menjadi Rp. 7,773 Triliun. Penyerapan tenaga kerja dari sektor ini juga mengalami peningkatan dari 190.664 orang menjadi 193.778 orang. Sedangkan pada tahun 2004, jumlah IKM di Jawa Tengah kurang lebih 6.461.428 usaha, yaitu lebih dari 15 persen dari seluruh jumlah IKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, terdapat 644,1 ribu perusahaan industri kecil dan menengah pada tahun 2010 atau naik 0,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 2,67 juta jiwa. dengan produksi IKM mencapai Rp 5.420,24 Miliar.

Selama ini, program IKM di Jawa Tengah telah berhasil mewujudkan salah satu tujuan dari pembangunan, yaitu menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi disparitas antar kabupaten di Jawa Tengah. Menurut data BPS, jika dibandingkan dengan daerah (kabupaten/ kota) di Indonesia, tidak terdapat kabupaten/ kota yang paling miskin ataupun paling kaya di Jawa Tengah. Sehingga Jawa Tengah dijadikan percontohan dalam pengembangan ekonomi lokal, di bidang kluster IKM, karena dapat menekan angka disparitas antar kota/kabupaten di Jawa Tengah. Bahkan dari sekian banyak IKM yang tersebar di Jawa Tengah, beberapa produk IKM tersebut merupakan produk unggulan yang sering memasok kebutuhan luar daerah bahkan luar negeri. Misalnya saja produk unggulan industri knalpot dari Kabupaten Purbalingga, produk mebel dari Kabupaten Sukoharjo dan lain sebagainya.

Adanya pembangunan yang terus berlangsung di Jawa Tengah, mengakibatkan bertambahnya aktivitas ekonomi. Sesuai dengan Teori Rostow, suatu negara/ wilayah akan mengalami lima tahap pertumbuhan ekonomi karena aktifitas pembangunan. Sehingga Jawa Tengah akan mengalami perubahan transisi struktur ekonomi. Transisi ekonomi wilayah tersebut dapat mempengaruhi eksistensi perkembangan ekonomi lokal yang sudah berkembang dan tersebar di seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Dari pernyataan tersebut, maka *research question* dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana transisi ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah dan keterkaitannya dengan perkembangan ekonomi lokalnya?". Oleh karena itu dilakukan penelitian Transisi Ekonomi Wilayah Kabupaten di Jawa Tengah dan keterkaitannya dengan Perkembangan Ekonomi Lokalnya. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu mengarahkan kebijakan-kebijakan pembangunan di Jawa Tengah yang sesuai dengan kondisi pembangunan ekonomi wilayahnya. Sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi kerakyatan di tengah-tengah era globalisasi yang dapat melunturkan kearifan dan budaya lokal.

Pada penelitian ini akan membahas tentang transisi ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah dan keterkaitannya dengan perkembangan ekonomi lokalnya yang dibagi dalam lima bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang dan pertanyaan penelitian. Bagian kedua adalah kerangka teori penelitian yang dilandasi oleh Teori Pertumbuhan Rostow dan Teori Perkembangan Ekonomi Lokal Coffey dan Polesse. Sedangkan pada bagian ketiga adalah data dan metode yang digunakan dalam penelitian. Bagian keempat adalah hasil dan pembahasan. Kemudian bagian terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan.

Gambar 1. Kerangka Teori (Analisis Penyusun, 2016)



2. DATA DAN METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah survei analitik. Sedangkan data-data statistik yang dibutuhkan diperoleh dengan cara telaah dokumen. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data jumlah produksi sektor pertanian kabupaten di Jawa Tengah, data jumlah produksi PDRB kabupaten di Jawa Tengah, data jumlah tenaga kerja sektor pertanian kabupaten di Jawa Tengah, data jumlah penduduk usia produktif kabupaten di Jawa Tengah, data jumlah penduduk total kabupaten di Jawa Tengah, data jumlah penduduk perkotaan kabupaten di Jawa Tengah, dan data luas lahan terbangun kabupaten di Jawa Tengah. Sedangkan input untuk perkembangan ekonomi lokal adalah data nilai produksi IKM kabupaten di Jawa Tengah, data jumlah produksi PDRB kabupaten di Jawa Tengah, data jumlah tenaga kerja IKM kabupaten di Jawa Tengah, data jumlah penduduk usia produktif kabupaten di Jawa Tengah, serta data nilai produksi koperasi kabupaten di Jawa Tengah. Semua data tersebut merupakan data tahun 2000 dan tahun 2010. Teknik analisis yang dilakukan ada tiga yaitu analisis deskriptif, analisis skoring dan pembobotan.

Analisis Deskriptif Kuantitatif

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis transisi ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah dan menganalisis karakteristik perkembangan ekonomi lokal terlebih dahulu. Ada empat variabel yang digunakan, yaitu variabel struktur ekonomi dan urbanisasi dalam menganalisis transisi ekonomi. Struktur ekonomi memiliki subvariabel sektor pertanian dan tenaga kerja pertanian. Sedangkan urbanisasi memiliki subvariabel tingkat urbanisasi dan kepadatan penduduk. Keempatnya digunakan untuk menentukan indikator yang sesuai dengan tahapan perkembangan wilayah oleh Rostow seperti pada Tabel 1. Sedangkan variabel IKM dan lembaga keuangan mikro dalam analisis perkembangan ekonomi lokal. Lembaga IKM kemudian dibagi menjadi dua subvariabel yaitu subvariabel produksi IKM dan tenaga kerja IKM. Indikator perkembangan ekonomi lokal yang disesuaikan dengan Teori Coffey dan Polese dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Indikator Transisi Ekonomi Wilayah (Rostow, 1960)

Transisi Ekonomi	Struktur Ekonomi		Urbanisasi	
	Sektor Pertanian	Tengah Kerja	Penduduk Perkotaan	Kepadatan Penduduk
Masyarakat Tradisional	Proporsi sektor pertanian terhadap PDRB di atas 75%	Proporsi tenaga kerja sektor pertanian terhadap penduduk usia produktif di atas 75%	Proporsi penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk di bawah 10%	Kepadatan penduduk bersih kurang dari 50 jiwa/ha
Prasyarat Tinggal Landas	Proporsi sektor pertanian terhadap PDRB lebih dari 50% - 75%	Proporsi tenaga kerja sektor pertanian terhadap penduduk usia produktif lebih dari 50% - 75%	Proporsi penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk lebih dari 10% - 25%	Kepadatan penduduk bersih lebih dari 50 – 150 jiwa/ ha
Tinggal Landas	Proporsi sektor pertanian terhadap PDRB lebih dari 30% - 50%	Proporsi tenaga kerja sektor pertanian terhadap penduduk usia produktif lebih dari 30% - 50%	Proporsi penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk lebih dari 25% - 60%	Kepadatan penduduk bersih lebih dari 150 – 200 jiwa/ha
Menuju Kedewasaan	Proporsi sektor pertanian terhadap PDRB lebih dari 10% - 30%	Proporsi tenaga kerja sektor pertanian terhadap penduduk usia produktif lebih dari 10% - 30%	Proporsi penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk lebih dari 60% - 80%	Kepadatan penduduk bersih lebih dari 200 – 400 jiwa/ha
Konsumsi Masal	Proporsi sektor pertanian terhadap PDRB 10% atau kurang.	Proporsi tenaga kerja sektor pertanian terhadap penduduk usia produktif 10% atau kurang	Proporsi penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk lebih dari 80%	Kepadatan penduduk bersih lebih dari 400 jiwa/ ha

Tabel 2. Indikator Perkembangan Ekonomi Lokal (Coffey dan Polese, 1984)

Perkembangan Ekonomi Lokal	Industri Kecil Menengah		Lembaga Keuangan Mikro
	Nilai Produksi	Tenaga Kerja	
Munculnya wirausaha Lokal	Rasio nilai produksi IKM kabupaten terhadap PDRB kabupaten dibandingkan dengan rasio produksi IKM Jawa Tengah terhadap PDRB Jawa < 0,5.	Rasio tenaga kerja IKM kabupaten terhadap penduduk usia produktif kabupaten dibandingkan dengan rasio tenaga kerja IKM Jawa Tengah terhadap penduduk usia produktif Jawa Tengah < 0,5.	Rasio volume usaha koperasi kabupaten terhadap PDRB kabupaten dibandingkan dengan rasio volume usaha koperasi Jawa Tengah terhadap PDRB Jawa Tengah < 0,5.
Ekspansi perusahaan lokal	Rasio nilai produksi IKM kabupaten terhadap PDRB kabupaten dibandingkan dengan rasio produksi IKM Jawa Tengah terhadap PDRB Jawa Tengah 0,5 - 1.	Rasio tenaga kerja IKM kabupaten terhadap penduduk usia produktif kabupaten dibandingkan dengan rasio tenaga kerja IKM Jawa Tengah terhadap penduduk usia produktif Jawa Tengah 0,5 - 1.	Rasio volume usaha koperasi kabupaten terhadap PDRB kabupaten dibandingkan dengan rasio volume usaha koperasi Jawa Tengah terhadap PDRB Jawa Tengah 0,5 - 1.
Munculnya struktur kontrol lokal	Rasio nilai produksi IKM kabupaten terhadap PDRB kabupaten dibandingkan dengan rasio produksi IKM Jawa Tengah terhadap PDRB Jawa Tengah 1 - 2	Rasio tenaga kerja IKM kabupaten terhadap penduduk usia produktif kabupaten dibandingkan dengan rasio tenaga kerja IKM Jawa Tengah terhadap penduduk usia produktif Jawa Tengah 1 - 2	Rasio volume usaha koperasi kabupaten terhadap PDRB kabupaten dibandingkan dengan rasio volume usaha koperasi Jawa Tengah terhadap PDRB Jawa Tengah 1 - 2
Kontrol lokal yang kuat terhadap sektor ekonomi daerah.	Rasio nilai produksi IKM kabupaten terhadap PDRB kabupaten dibandingkan dengan rasio produksi IKM Jawa Tengah terhadap PDRB Jawa Tengah > 2	Rasio tenaga kerja IKM kabupaten terhadap penduduk usia produktif kabupaten dibandingkan dengan rasio tenaga kerja IKM Jawa Tengah terhadap penduduk usia produktif Jawa Tengah > 2	Rasio volume usaha koperasi kabupaten terhadap PDRB kabupaten dibandingkan dengan rasio volume usaha koperasi Jawa Tengah terhadap PDRB Jawa Tengah > 2

Analisis Skoring

Setelah melakukan analisis deskriptif kuantitatif, dilanjutkan dengan analisis skoring. Analisis skoring yang dilakukan adalah memberikan ranking atau skor pada tahapan transisi ekonomi dan tahapan perkembangan ekonomi lokal. Skor terendah diberikan pada tahapan yang paling awal, sedangkan skor tertinggi diberikan pada tahapan yang paling akhir. Pada transisi ekonomi wilayah, ada lima tahap, sehingga tahap pertama yaitu masyarakat tradisional diberi skor 1, sedangkan tahapan paling akhir (konsumsi masal) diberi skor tertinggi yaitu 5. Sedangkan pada perkembangan ekonomi lokal, ada empat tahap perkembangan. Jadi, pada tahap pertama yaitu munculnya kewirausahaan lokal diberi skor 1 dan tahap keempat yaitu control lokal yang kuat diberi skor 4.

Analisis Pembobotan

Dari hasil skoring kemudian dilanjutkan dengan analisis pembobotan. Analisis ini dilakukan untuk menentukan tingkat kepentingan suatu variabel. Pada penelitian ini, subvariabel sektor pertanian memiliki bobot 35% (0,35). Sedangkan subvariabel tenaga kerja diberi bobot 30% (0,3). Dalam teori Rostow dijelaskan bahwa urbanisasi digunakan untuk mengetahui transisi ekonomi wilayah, namun bobotnya dibawah variabel struktur ekonomi. Jadi, sub variabel penduduk perkotaan dan kepadatan penduduk diberi bobot 20% (0,2) dan 15% (0,15). Hal tersebut juga dilakukan terhadap perkembangan ekonomi lokal. Subvariabel Produksi IKM diberi bobot 50% (0,5). Sedangkan sub variabel tenaga kerja IKM diberi bobot 30% (0,3). Lembaga keuangan mikro yang memiliki tingkat kepentingan paling rendah pada analisis perkembangan ekonomi lokal diberi skor 20% (0,2).

Dari perkalian skor dan bobot masing-masing subvariabel kemudian dijumlahkan. Untuk mengetahui transisi ekonomi wilayah dan perkembangan ekonomi lokal dibutuhkan *range* nilai hasil perkalian analisis skoring dan pembobotan. Mengingat kemungkinan besar analisis tersebut menghasilkan angka yang tidak bulat.

Analisis Korelasi

Analisis korelasi sederhana ini dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara transisi ekonomi wilayah dan perkembangan ekonomi lokal. Walaupun ekonomi lokal merupakan bagian dari ekonomi wilayah, namun harus tetap dilakukan analisis ini untuk benar-benar memastikan pengaruh ekonomi lokal terhadap ekonomi wilayah. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan diagram pencar atau *scatter plot*. *Scatter plot* adalah gambar berupa grafik digunakan untuk menganalisis pola kemungkinan hubungan (korelasi) antara dua variabel dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut melalui persebaran titik-titik variabelnya (Wijaya, 2005). *Scatter plot* digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat dari dua variabel. Diagram pencar transisi ekonomi dan perkembangan ekonomi lokal diisi dengan dua puluh sembilan titik yang mewakili kabupaten di Jawa Tengah. Pola persebaran titik-titik tersebut akan menggambarkan hubungan transisi ekonomi wilayah dan perkembangan ekonomi lokal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Struktur Ekonomi

Sebagian besar kabupaten yang memiliki proporsi produksi pertanian rendah, proporsi tenaga kerja pertanian juga rendah begitu pula sebaliknya. Misalnya saja Kabupaten Kudus, memiliki produksi pertanian sebesar 4,1 persen dari jumlah produksi PDRB. Hal tersebut diikuti pula dengan jumlah tenaga kerja pertanian yang hanya sebesar 14 persen dari total penduduk usia produktif. Hal ini dikarenakan pada tahun 2000, struktur ekonomi Kabupaten Kudus sudah didominasi oleh sektor industri. Sedangkan Kabupaten Cilacap pada tahun 2000 memiliki produksi sektor pertanian tertinggi yaitu Rp 2 Triliun dari total PDRBnya sebesar Rp 14 Triliun. Hal tersebut karena struktur ekonomi di Kabupaten Cilacap lebih didominasi oleh sektor industri, sama seperti Kabupaten Kudus. Kabupaten dengan produksi hasil pertanian tertinggi setelah Cilacap dan Brebes adalah Wonogiri, Pati dan Boyolali.

Kabupaten Kudus memiliki proporsi jumlah hasil pertanian yang paling kecil di Jawa Tengah tahun 2010 yaitu 2,4 persen atau Rp 1,2 Triliun dari total PDRBnya yaitu Rp 52,9 Triliun. Memiliki proporsi jumlah tenaga kerja sektor pertanian yang paling sedikit pula yaitu 9,2 persen atau 49.643 jiwa pekerja dari total penduduk usia produktif yaitu 542.051 jiwa. Struktur ekonomi Kabupaten Kudus didominasi oleh sektor industri. Oleh karena itu tidak heran apabila proporsi sektor pertaniannya sangat kecil.

Kabupaten dengan proporsi hasil pertanian tertinggi tahun 2010 yaitu Kabupaten Brebes sebesar 42,4 persen. Produksi sektor pertanian Kabupaten Brebes pada tahun 2010 sebesar Rp 8,5 Triliun dari total PDRB yaitu Rp 20 Triliun. Hasil produksi pertanian Kabupaten Brebes tersebut berasal dari tanaman padi. Pada tahun 2010 hasil panen padi sawah meningkat menjadi 587.992 ton dan padi ladang sebanyak 7.341 ton. Komoditas pertanian terbanyak kedua di Kabupaten Brebes adalah singkong dengan hasil panen pada tahun 2010 sebanyak 32.775 ton. Jumlah tenaga kerja pertanian di Brebes juga merupakan tertinggi di Jawa Tengah yaitu 416.332 jiwa dari 1.137.982 jiwa penduduk usia produktif. Namun, proporsi tenaga kerja sektor pertanian Kabupaten Brebes bukan merupakan tertinggi di Jawa Tengah yaitu 36,6 persen.

Proporsi tenaga kerja tertinggi di Jawa Tengah adalah Kabupaten Wonogiri yaitu sebesar 51,3 persen atau 310.059 jiwa bekerja di sektor pertanian dari 606.057 angkatan kerja. Proporsi hasil pertanian Kabupaten Wonosobo tertinggi kedua setelah Kabupaten Brebes yaitu sebesar 36,9 persen dengan hasil pertanian sebesar Rp 4,9 Triliun dari total PDRBnya yaitu Rp 13 Triliun. Selain padi, hasil pertanian Wonogiri yang unggul adalah singkong dan jagung. Sedangkan produksi hasil pertanian tertinggi kedua setelah Brebes adalah Kabupaten Cilacap dengan hasil produksi sebesar Rp 5,6 Triliun. Namun, proporsi produksi pertanian Kabupaten Cilacap hanya 7,5 persen dan proporsi tenaganya 24,4 persen.

Urbanisasi

Pada tahun 2000, tingkat urbanisasi yang paling tinggi di Jawa Tengah adalah Kabupaten Sukoharjo (45 persen) dan Klaten (35 persen). Hal ini dikarenakan Kabupaten Sukoharjo berbatasan langsung dengan Kota Surakarta yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Ditambah lagi dengan adanya kawasan perkotaan Solo Baru yang berada di Kecamatan Grogol dan Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo yang merupakan kawasan permukiman dan komersial. Sedangkan letak geografis Kabupaten Klaten berada di antara Kabupaten Sukoharjo dan Provinsi D.I.Yogyakarta. Selain kedua kabupaten tersebut merupakan kawasan Solo Raya, keduanya juga termasuk kawasan perkotaan Joglosemar. Sehingga tidak heran bila tingkat urbanisasinya tinggi. Kondisi infrastruktur dan fasilitasnya pun baik dan cukup lengkap. Namun, kepadatan penduduk bersih Kabupaten Sukoharjo dan Klaten tidak menjadi wilayah terpadat di Jawa Tengah.

Kabupaten Wonosobo dengan kepadatan penduduk bersih yaitu 116 jiwa/ha lah yang menjadi kabupaten terpadat di Jawa Tengah pada tahun 2000. Disusul dengan Kabupaten Pemalang dengan kepadatan 106 jiwa/ha. Hal tersebut dikarenakan jumlah lahan yang terbangun di kedua kabupaten tersebut masih sedikit. Pada tahun 2000, dari total luas kabupaten Wonosobo yaitu 98.468 ha yang terbangun hanya 6.282 ha atau 6 persennya saja. Masih banyak lahan non terbangun berupa lahan pertanian di Kabupaten Wonosobo. Sedangkan dari 101.190 ha luas Kabupaten Pemalang, yang terbangun hanya 12 persen saja yaitu 11.778 ha pada tahun 2000.

Pada tahun 2010, kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki tingkat urbanisasi paling tinggi yaitu Kabupaten Semarang dengan proporsi penduduk perkotaan sebanyak 21,7 persen atau 2012.196 jiwa dari total penduduk 930.77 jiwa. Hal tersebut salah satunya dikarenakan banyaknya industri besar yang ada di Kabupaten Semarang, tepatnya di sekitar kawasan perkotaan Kabupaten Semarang. Sehingga banyak migrasi masuk untuk bekerja di industri-industri tersebut yang disertai dengan munculnya permukiman warga. Faktanya pun saat ini di wilayah Ungaran Timur yang dulunya lahan hijau sekarang sudah tumbuh perumahan-perumahan baru. Ditambah lagi dengan adanya pembangunan jalan tol Semarang-Bawen yang juga mempengaruhi perkembangan Kabupaten Semarang. Namun hasil perhitungan kepadatan bersih Kabupaten Semarang tidak menjadi yang terpadat (46 jiwa/ha).

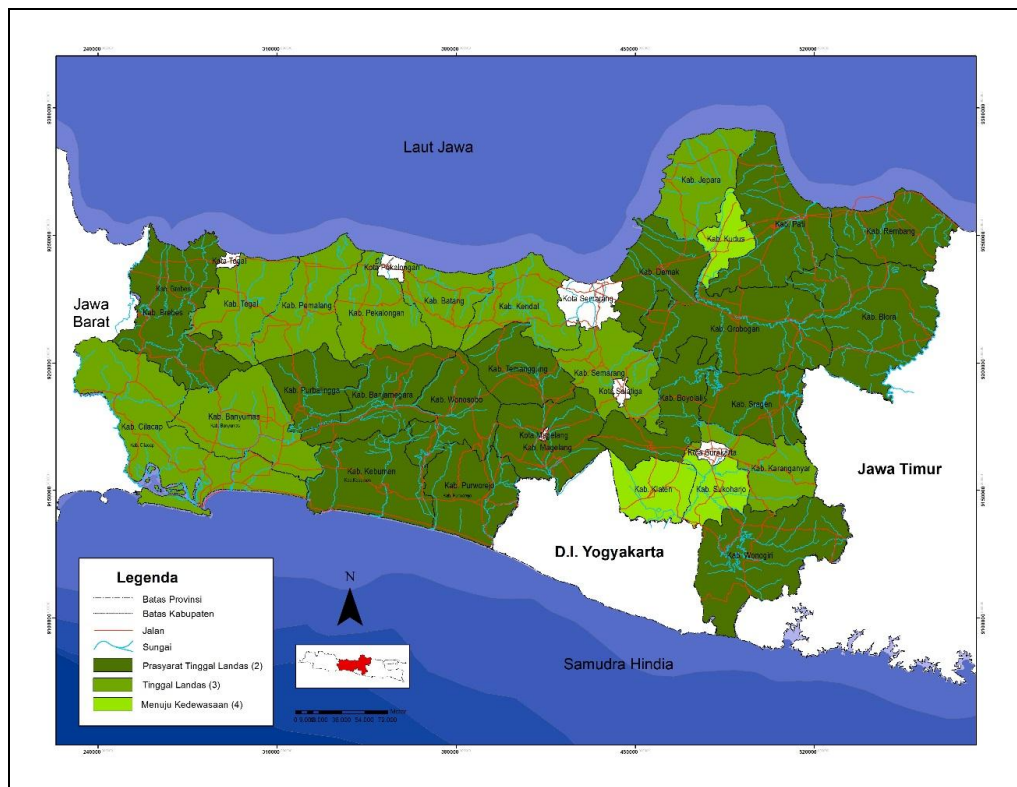
Kabupaten yang memiliki tingkat kepadatan penduduk bersih tertinggi adalah Kabupaten Kendal yaitu 304 jiwa/ha. Banyak investor yang berminat untuk membangun perusahaan di Kabupaten Kendal. Lokasinya yang dilewati jalur utama pantai utara memudahkan mobilisasi aktifitas industri. Selain itu, Kabupaten Kendal berbatasan langsung dengan ibu kota Jawa Tengah, sehingga mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal. Kabupaten Wonogiri menjadi kabupaten yang tingkat kepadatan bersihnya paling rendah pada tahun 2010 yaitu 33 jiwa/ha. Kabupaten Wonogiri terletak di paling Tenggara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Lokasinya yang jauh dari ibu kota provinsi juga sangat mempengaruhi perkembangan Kabupaten Wonogiri. Belum banyak investor yang menanamkan modal di sana. Karena jika dibandingkan dengan kabupaten di Jawa Tengah bagian utara, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas di Kabupaten Wonogiri lebih minimum.

Analisis Transisi Ekonomi Wilayah

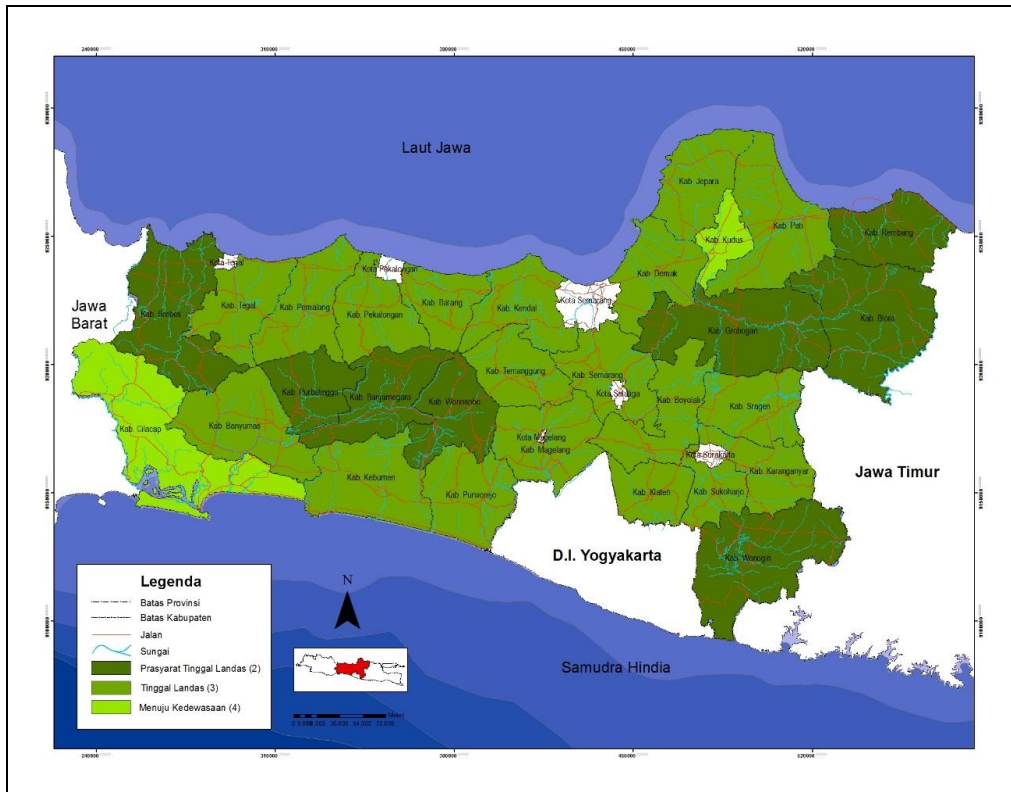
Dari analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa pada tahun 2000, semua kabupaten di Jawa tengah telah bertransisi dari tahap masyarakat tradisional. Walaupun kabupaten Kabupaten Brebes, Tegal, Demak, Semarang, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang dan Boyolali memiliki produksi sektor pertanian yang cukup tinggi bahkan mendominasi struktur ekonomi daerah, pada tahun 2000 kabupaten tersebut sudah berada pada tahap prasyarat tinggal landas. Sedangkan kabupaten yang bertransisi ke tahap tinggal landas terdapat sepuluh kabupaten. Kabupaten-kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Cilacap, Banyumas, Karanganyar, Jepara, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang dan Tegal.

Gambar 2. Peta Transisi Ekonomi Wilayah Jawa Tengah Tahun 2000 (Analisis, 2016)



Kabupaten Kudus, Sukoharjo dan Klaten berada pada tahap menuju kedewasaan. Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten pada tahun 2000 memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi, salah satunya karena termasuk wilayah perkotaan Joglosemar. Wilayah perkotaan Joglosemar banyak mengalami perkembangan baik pada aspek fisik, ekonomi dan sosilanya. Sehingga Kabupaten Sukoharjo dan Klaten sudah berada dalam tahap keempat pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Sedangkan Kabupaten Kudus merupakan kabupaten yang tingkat industrialisasinya paling tinggi di Jawa Tengah. Struktur ekonominya pun didominasi oleh sektor industri. Terlebih lagi perusahaan percetakan dan pengemasan terbesar se-Asia Tenggara (PT. Pura Nusapersada), PT Djarum dan perusahaan rokok lainnya berlokasi di Kabupaten Kudus.

Gambar 3. Peta Transisi Ekonomi Wilayah Jawa Tengah Tahun 2010 (Analisis, 2016)



Pada dua puluh kabupaten lainnya di Jawa Tengah tidak mengalami perkembangan transisi ekonomi wilayah. Dari dua puluh kabupaten tersebut, beberapa diantaranya yaitu Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Wonogiri, Grobogan, Blora, Rembang dan Brebes pada tahun 2000-2010 masih dalam tahapan prasyarat tinggal landas. Pada Gambar 2 ditunjukkan pada warna hijau tua. Sedangkan Kabupaten Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Karangayar dan Banyumas selama tahun 2000-2010 berada pada tahap tinggal landas. Satu-satunya kabupaten yang berada pada tahap menuju kedewasaan selama tahun 2000-2010 yaitu Kabupaten Kudus.

Analisis Industri Kecil dan Menengah

Jumlah IKM Jawa Tengah tahun 2000 termasuk semua kabupaten dan kota adalah 641.581 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.345.114 jiwa dari 19.564.894 jiwa penduduk usia produktif. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah IKM Jawa Tengah adalah 644.864 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.672.448 jiwa dari 21.543.429 jiwa penduduk usia produktif. Produksi IKM Jawa Tengah tahun 2000 yaitu Rp 5,2 Triliun dan pada tahun 2010 produksi IKM Jawa Tengah meningkat menjadi lebih dari Rp 17 Triliun.

Pada tahun 2000 jumlah produksi IKM Kabupaten Tegal merupakan tertinggi di Jawa Tengah yaitu Rp 301 Miliar dengan produksi jumlah PDRB Rp 2 Triliun. Jenis IKM Kabupaten Tegal yang sangat berkembang yaitu industri logam. Kabupaten Tegal memiliki jumlah IKM logam terbanyak di wilayah Jawa Tengah. IKM merupakan subsektor dari sektor industri, akan tetapi sektor industri bukan merupakan sektor yang mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Tegal. Subsektor IKM merupakan subsektor yang potensial di Kabupaten Tegal karena nilai produksinya memiliki nilai LQ lebih dari 2 dan dalam penyerapan tenaga kerja pun sudah baik yaitu dengan nilai LQ 1,54. Kabupaten dengan hasil produksi IKM (lebih dari 2) dan penyerapan tenaga kerja yang baik (LQ lebih dari 1) dan menjadi subsektor potensial adalah Kabupaten Purbalingga, Kebumen, Purworejo dan Sragen.

Kabupaten dengan jumlah produksi IKM terendah adalah Kabupaten Demak yaitu Rp 68 Miliar dari total PDRB Rp 2,1 triliun, nilai LQnya pun masih kurang dari 1. Penyerapan tenaga kerja IKM Kabupaten

Demak juga terendah se-Jawa Tengah yaitu 31.557 jiwa dengan nilai LQ 0,4. Hal ini dikarenakan potensi perekonomian Kabupaten Demak adalah sektor pertanian. Bahkan hampir setengah dari produksi PDRB Kabupaten Demak adalah sektor pertanian. IKM bukan merupakan subsektor industri yang unggul di Cilacap dan Kudus. Karena keduanya memiliki nilai LQ terendah di Jawa Tengah.

Jumlah produksi IKM Jawa Tengah tahun 2010 yaitu Rp 18 Triliun dan jumlah PDRB Jawa Tengah Rp 623 Triliun. Sedangkan jumlah tenaga kerja IKM Jawa Tengah tahun 2010 adalah 2.193.241 jiwa dan jumlah penduduk usia produktif Jawa Tengah 21.543.429 jiwa. Kabupaten dengan produksi IKM tertinggi yaitu Kabupaten Cilacap. Meskipun produksi IKMnya paling tinggi namun IKM bukan merupakan subsektor unggulan di Kabupaten Cilacap. Kabupaten Jepara menjadi kabupaten dengan tenaga kerja IKM tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 2010 yaitu 239.010 jiwa dari total jumlah penduduk produktif yaitu 733.234 jiwa dan nilai LQ 3,2. Hasil analisis LQ produksi IKM Kabupaten Jepara merupakan tertinggi di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Jepara merupakan sentra IKM yang kerajinan ukir Jawa Tengah.

Pada tahun 2010, hasil analisis LQ untuk produksi IKM yang terendah di Jawa Tengah adalah Kabupaten Wonogiri yaitu 0,17. Jumlah produksi IKM di Kabupaten Wonogiri juga merupakan terendah yaitu Rp 68 Miliar dari total PDRB nya Rp 13 Triliun. Hal tersebut diiringi dengan jumlah tenaga kerja IKM sebanyak 65.357 jiwa dengan LQ tenaga kerja IKM sebesar 1,1. Hal ini membuktikan bahwa IKM bukan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Wonogiri. Pada faktanya, potensi Kabupaten Wonogiri adalah sektor pertanian khususnya pada tanaman ubi singkong dan padi. Walaupun bukan merupakan sektor unggulan, subsektor IKM sudah cukup baik dalam mengurangi pengangguran di Kabupaten Wonogiri.

Kabupaten dengan nilai LQ tenaga kerja IKM terendah adalah 0,2 yaitu Kabupaten Demak. Jumlah tenaga kerja IKM Kabupaten Demak pada tahun 2010 adalah 14.485 jiwa dari total penduduk angkatan kerjanya adalah 708.408 jiwa. Walaupun hasil produksi subsektor IKM juga tidak unggulan di Kabupaten Demak karena nilai LQ nya hanya 0,5; tetapi hasil produksi IKM Kabupaten Demak bukan merupakan yang rendah di Jawa Tengah (Rp 202 Miliar). Masih ada beberapa kabupaten di Jawa Tengah yang produksi IKMnya di bawah Demak yaitu Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, Kebumen, Wonosobo, Wonogiri, Karanganyar dan Grobogan. Sedikitnya tenaga kerja yang diserap subsektor IKM salah satunya dikarenakan sebagian dari penduduk yang bekerjadi subsektor IKM beralih menjadi buruh pabrik. Karena pada beberapa tahun terakhir, mulai banyak industri besar yang ada di Kabupaten Demak. Misalnya saja industri kertas yaitu PT Sinarmas, industri kopi yaitu PT Arkof, industri garmen yaitu PT Delta dan lain sebagainya.

Analisis Koperasi

Jumlah volume usaha koperasi Jawa Tengah tahun 2010 sebesar Rp 16 Triliun terhadap Jumlah PDRB Jawa Tengah yaitu Rp 623 Triliun. Sedangkan hasil analisis LQ kabupaten di Jawa Tengah sebagian besar menunjukkan angka kurang dari 1. Kabupaten yang memiliki nilai LQ lebih dari 1 pada tahun 2010 yaitu Kabupaten Rembang, Sragen, Sukoharjo, Klaten, Wonosobo, Kebumen dan Banjarnegara. Dari kabupaten-kabupaten tersebut, subsektor koperasi di Kabupaten Wonosobo memiliki nilai LQ yang paling tinggi yaitu 2. Hal ini merupakan salah satu tanda bahwa koperasi di Kabupaten Wonosobo sudah menjadi subsektor unggulan. Jumlah volume koperasi Kabupaten Wonosobo pada tahun 2010 adalah Rp 485 Miliar. Jumlah koperasi di Kabupaten Wonosobo ada 330 unit dan yang aktif hanya 192 unit. Walaupun jumlah koperasi yang aktif relatif sedikit dibandingkan dengan kabupaten lainnya, tetapi koperasi di Wonosobo mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 70.315 orang karyawan.

Kabupaten Boyolali menjadi kabupaten dengan volume usaha koperasi paling rendah diantara kabupaten lainnya di Jawa Tengah tahun 2010 yaitu dengan jumlah Rp 84 Miliar. Di sisi lain, jumlah koperasi yang tersebar di Kabupaten Boyolali ada 1.016 unit, terbanyak kedua setelah Sragen. Walaupun tidak unggul, produksi koperasi di Boyolali bukan merupakan nilai LQ terendah. Karena nilai LQ terendah adalah Kabupaten Cilacap. Namun, jumlah koperasi di Cilacap cukup banyak yaitu lebih dari 400 unit.

Sedangkan pada tahun 2015, Jumlah volume usaha koperasi Jawa Tengah tahun 2015 yaitu Rp 47 Triliun. Sedangkan jumlah PDRB Jawa Tengah Rp 1.011 Triliun. Jumlah koperasi yang ada di kabupaten/kota di Jawa Tengah yaitu 28.227 unit koperasi, dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 138 ribu orang. Kabupaten Banyumas menjadi kabupaten dengan jumlah volume usaha tertinggi pada tahun 2015 yaitu Rp 3 Triliun dan nilai LQ tertinggi yaitu 2,07. Hal ini menandakan bahwa koperasi merupakan subsektor unggulan di Banyumas tahun 2015. Padahal jumlah koperasi di Banyumas hanya 575 unit, jauh lebih sedikit

dari Kabupaten Wonogiri dengan jumlah koperasi tahun 2015 adalah 7.910 unit. Subsektor koperasi di Wonogiri juga sudah menjadi subsektor unggulan dengan nilai LQ 1,68.

Subsektor koperasi di Kabupaten Pekalongan juga belum unggul di tahun 2015, bahkan nilai LQ nya merupakan terendah kedua. Di sisi lain, Pekalongan terkenal dengan pengembangan ekonomi lokalnya berupa industri batik. Bahkan produk batiknya dapat diperoleh dengan mudah tanpa harus ke Pekalongan. Karena batik pekalongan sudah didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menandakan bahwa belum adanya sinergitas antara IKM dan LKM khususnya koperasi di Kabupaten Pekalongan. Agar koperasi dapat meningkatkan perannya dalam membantu mengembangkan usaha lokal sehingga ekonomi lokal di Kabupaten Pekalongan meningkat dan lebih siap dalam menghadapi era globalisasi. Selain Wonogiri dan Banyumas, Kabupaten Magelang, Bora, Rembang, Pati dan Temanggung memiliki subsektor koperasi yang sudah unggul pada tahun 2015.

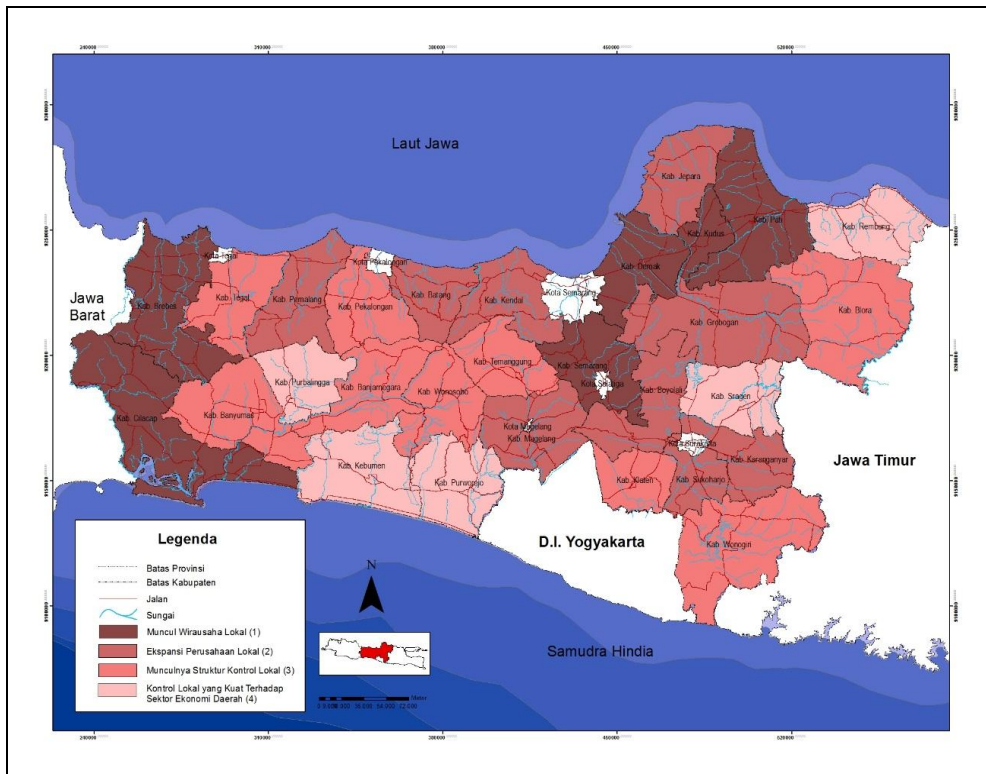
Analisis Perkembangan Ekonomi Lokal

Dari hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa pada tahun 2000, perkembangan ekonomi lokal Kabupaten Cilacap, Pati, Kudus, Demak dan Brebes masih dalam tahap awal munculnya perusahaan lokal. Sedangkan Kabupaten Magelang, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Grobogan, Jepara, Kendal, Batang dan Pemalang berada pada tahap ekspansi perusahaan lokal. Kabupaten yang berada pada tahap ketiga dari perkembangan ekonomi lokal yaitu munculnya struktur kontrol lokal pada tahun 2000 adalah Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Klaten, Wonogiri, Bora, Temanggung, Pekalongan dan Tegal.

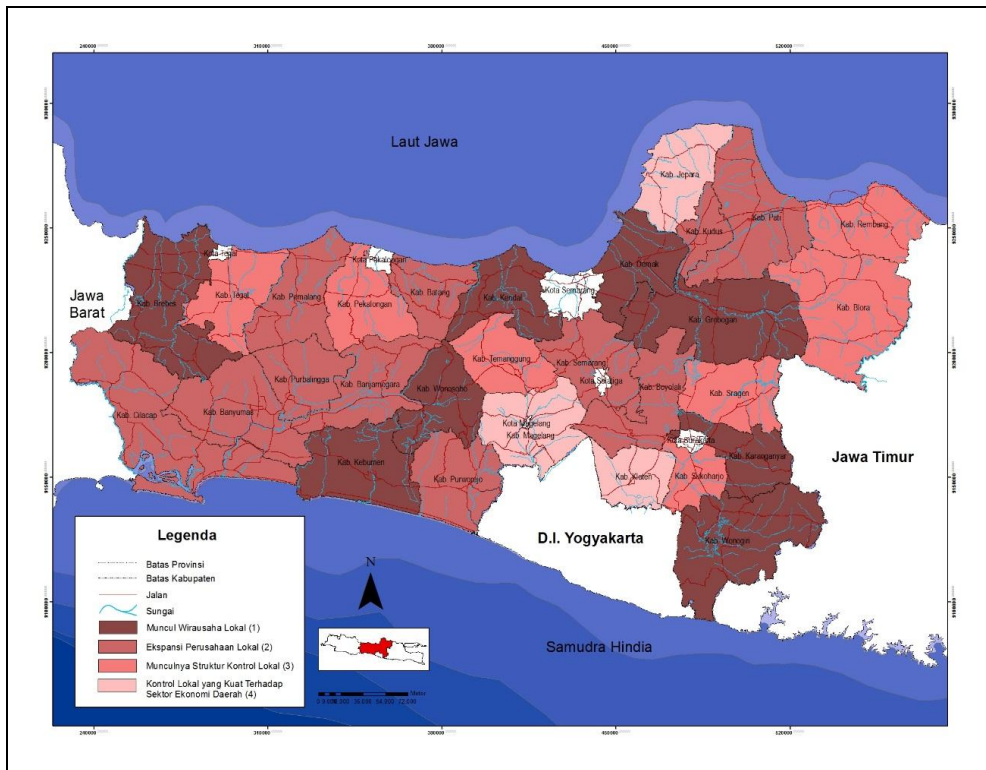
Pada tahun 2000 hanya Kabupaten Rembang, Sragen, Purbalingga, Purworejo dan Kebumen berada pada tahap keempat dari perkembangan ekonomi lokal, yaitu kontrol lokal yang kuat terhadap sektor ekonomi. Kondisi ekonomi lokal di Kabupaten Purbalingga sangat dipengaruhi oleh IKM knalpot yang juga dijadikan produk IKM unggulan Jawa Tengah. Kabupaten Rembang juga berpotensi pada bidang IKM pengolahan hasil laut. Tidak hanya memproduksi garam, tetapi juga tepung ikan, terasi, kerupuk ikan dan berbagai macam produk makanan lainnya. Selain itu, batik tulis Rembang yang kebanyakan diproduksi oleh penduduk Kecamatan Lasem dan Pancur sudah mulai berkembang.

Jika dibandingkan dengan tahun 2000, ekonomi lokal di Jawa Tengah tahun 2010 justru menurun. Kabupaten Karanganyar dan Grobogan pada tahun 2010 berada pada tahap awal perkembangan ekonomi lokal. Padahal tahun 2000 sudah berada pada tahap ekspansi perusahaan lokal. Pada tahun 2000, Kabupaten Banyumas dan Banjarnegara sudah mencapai tahap ketiga. Tetapi tahun 2010 Kabupaten Banyumas dan Banjarnegara mundur menjadi tahap kedua perkembangan ekonomi lokal. Sedangkan Kabupaten Wonosobo dan Wonogiri mundur pada tahap pertama kemunculan wirausaha lokal yang tadinya sudah berada pada tahap munculnya struktur kontrol lokal. Kabupaten Sragen dan Rembang mengalami kemunduran dari tahap empat menjadi tahap ketiga pada tahun 2010. Kabupaten Purbalingga dan Purworejo yang sudah mencapai tahap keempat pada tahun 2000 justru berada pada tahap ekspansi perusahaan lokal. Kemunduran yang drastis dialami oleh Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2000 Kabupaten Kebumen sudah berada pada tahap tertinggi perkembangan ekonomi lokal, namun tahun 2010 kemunduran ekonomi lokal Kabupaten Kebumen menjadikan kabupaten ini pada tahap awal yaitu kemunculan wirausaha lokal.

Gambar 4. Peta Perkembangan Ekonomi Lokal Jawa Tengah Tahun 2000 (Analisis, 2016)



Gambar 5. Peta Perkembangan Ekonomi Lokal Jawa Tengah Tahun 2010 (Analisis, 2016)

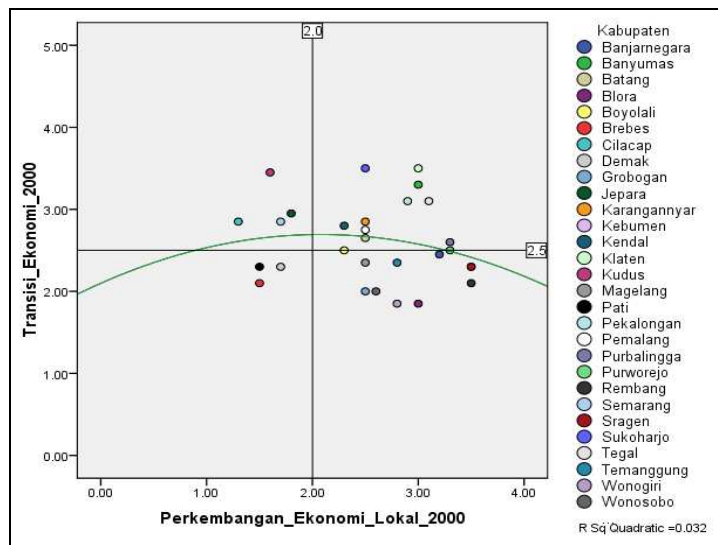


Kemunduran ekonomi lokal tersebut dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya yaitu sektor industri besar ataupun sektor perdagangan dan jasa lebih berkembang. Pada era modernisasi, peralatan produksi para pengusaha lokal kabupaten di Jawa Tengah masih banyak yang kurang canggih. Selain itu pada masa globalisasi seperti ini, banyak masyarakat menganggap produk lokal kurang menarik dan kualitasnya kurang baik. Sehingga pemerintah, pelaku usaha, masyarakat serta stakeholder lainnya di Jawa Tengah. Hendaknya dapat meningkatkan sinergitas dalam program mengembangkan ekonomi lokal. Karena ekonomi lokal merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang dapat mengurangi angka pengangguran dan mengurangi disparitas antar wilayah. Selain itu para pelaku usaha diharapkan dapat lebih kreatif dan inovatif agar produk lokalnya memiliki daya saing tinggi.

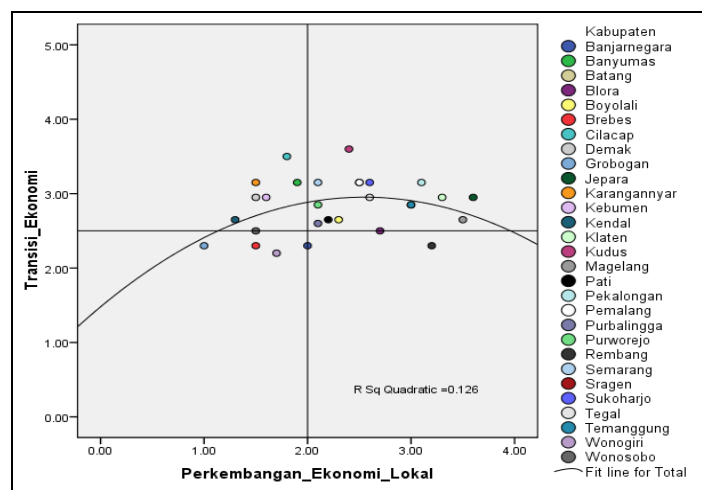
Analisis Keterkaitan Transisi Ekonomi Wilayah dengan Perkembangan Ekonomi Lokal Kabupaten di Jawa Tengah

Dari hasil *scatter plot* transisi ekonomi wilayah dan perkembangan ekonomi lokal kabupaten di Jawa Tengah tahun 2000 dan 2010, diketahui bahwa pola persebaran titik-titiknya membentuk pola garis lengkung. Artinya, keterkaitan transisi ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah dengan perkembangan ekonomi lokalnya memiliki hubungan non linier dapat diartikan bahwa keterkaitan antara transisi ekonomi dengan perkembangan ekonomi lokal yaitu keduanya memiliki hubungan yang fluktuatif.

Gambar 6. Scatter Plot Transisi Ekonomi dan Perkembangan Ekonomi Lokal Tahun 2000 (Analisis, 2016)



Gambar 7. Scatter Plot Transisi Ekonomi dan Perkembangan Ekonomi Lokal Tahun 2000 (Analisis, 2016)



Keduanya tidak bisa selalu saling mempengaruhi. Terlihat pada Gambar 5 pada tahun 2000 sebagian kabupaten yang memiliki tingkat transisi ekonomi wilayah yang tinggi juga memiliki tingkat perkembangan ekonomi lokal yang tinggi. Namun sebagian kabupaten lainnya memiliki tingkat transisi ekonomi yang rendah tetapi perkembangan ekonomi lokalnya tinggi. Sedangkan pada tahun 2010 yang dapat dilihat pada Gambar 7, walaupun sebagian besar persebaran kabupaten juga berada pada tingkat transisi ekonomi wilayah yang tinggi dan perkembangan ekonomi lokal yang tinggi. Namun sebagian besar lainnya tersebar pada tingkat transisi ekonomi yang tinggi dan perkembangan ekonomi lokal yang rendah, kebalikan dengan kondisi tahun 2000. Hubungan keterkaitan keduanya pun lemah baik tahun 2000 dan 2010 yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasinya yang mendekati 0.

Lemahnya hubungan keterkaitan transisi ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah dengan perkembangan ekonomi lokalnya dikarenakan banyak sekali faktor yang mempengaruhi transisi ekonomi wilayah. Tidak hanya perkembangan ekonomi lokal saja. Pada struktur ekonomi setiap kabupaten di Jawa Tengah tersusun dari sembilan sektor dan banyak sekali subsektor. Sedangkan subsektor IKM dan koperasi hanya bagian dari sektor industri pengolahan dan sektor jasa keuangan. Jika dilihat dari struktur ekonomi setiap kabupaten di Jawa Tengah pada bagian sektor industri pengolahan, sebagian besar kabupaten di Jawa Tengah produksi subsektor industri besar lebih besar dibandingkan subsektor industri kecil dan menengah. Selain itu, beberapa kabupaten memiliki struktur ekonomi tidak didominasi sektor industri, sehingga produksi IKM dan koperasinya rendah. Kemampuan masing-masing kabupaten dalam membiayai pembangunan serta bantuan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat juga mempengaruhi terjadinya transisi ekonomi wilayah masing-masing kabupaten di Jawa Tengah. Selain faktor ekonomi, masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi transisi ekonomi yaitu kondisi geografis, aksesibilitas, kualitas sumber daya manusia dan sebagainya.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari kegiatan analisis penelitian tentang transisi ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah dan keterkaitannya dengan perkembangan ekonomi lokalnya yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan. Dari tahun 2000 hingga 2010, sebagian besar kabupaten tidak mengalami transisi ekonomi. Hanya delapan kabupaten yang mengalami transisi ekonomi ke tahap berikutnya dan dua kabupaten mengalami penurunan. Sedangkan dalam perkembangan ekonomi lokalnya, ada dua belas kabupaten mengalami kemunduran dan hanya delapan kabupaten yang mengalami perkembangan. Transisi ekonomi yang tinggi dialami oleh kabupaten dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri pengolahan yaitu Kabupaten Kudus dan Cilacap. Transisi ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah memiliki hubungan non linier dengan perkembangan ekonomi lokalnya. Keterkaitan transisi ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah dengan perkembangan ekonomi lokalnya lemah

Dari hasil penelitian tahapan perkembangan wilayah Jawa Tengah, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah; untuk Pemerintah Kabupaten yang tidak mengalami perkembangan wilayah dalam kurun waktu 2000 – 2010 diharapkan dapat mengevaluasi kebijakan pembangunan regional maupun lokalnya dan disesuaikan dengan kebutuhan, potensi daerah dan kondisi perkembangan saat ini. Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Wonosobo, Kebumen, Wonogiri, Karanganyar, Grobogan dan Kendal mengalami penurunan dalam ekonomi lokalnya. Sebaiknya pemerintah kabupaten tersebut membuat inovasi baru terkait program pengembangan ekonomi lokal serta meningkatkan kerjasama antar pelaku pembangunan guna memperbaiki kondisi ekonomi lokal agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Sebagian besar kabupaten di Jawa Tengah produksi pertaniannya meningkat namun mengalami penurunan proporsi produksi pertanian. Sehingga muncul kekhawatiran pada suatu saat produksi pertanian di Jawa Tengah juga menurun. Oleh karena itu, bagi kabupaten-kabupaten yang memiliki potensi pada sektor pertanian misalnya seperti Kabupaten Klaten, Demak, Wonogiri, Karanganyar diharapkan dapat membuat kebijakan yang lebih meningkatkan sektor pertaniannya agar kebutuhan pangan di Jawa Tengah selalu terpenuhi.

Bagi pemerintah kabupaten yang tidak unggul pada sektor pertanian dan IKMnya, dapat mengeksplor lebih lanjut lagi mengenai potensi daerah masing-masing. Selanjutnya dapat membuat kebijakan/ strategi

pembangunan regional maupun lokal yang mendukung berkembangnya sektor potensial di wilayah tersebut, sehingga anggaran dana yang dialokasikan untuk mengembangkan daerah dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Walaupun keterkaitan transisi ekonomi wilayah dengan perkembangan ekonomi lokal di Jawa Tengah kecil; seluruh stakeholder harus tetap berusaha meningkatkan perkembangan ekonomi lokal agar kabupaten/ wilayahnya memiliki daya saing yang tinggi. Hal tersebut dapat dilakuakn dengan membuat kebijakan terkait, membantu pendistribusian produk IKM, meningkatkan iklim berwirausaha ataupun sebagainya. Karena IKM cukup baik dalam mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah.

5. REFERENSI

- Adi, R. K. (2012). Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Sukoharjo. (*SEPA*) Vol. 9 (No.1), September 2012 : 50 – 63.
- Adisasmita. H.R. (2005). Dasar-dasar Ekonomi Wilayah. *Graha Ilmu, Jakarta*.
- Arsyad. L. (1999) Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *BPFE, Yogyakarta*
- Blakely, E. J.(1994) Planning Local Economic Development: Theory and Practice.
- Coffey, W. J., & Polese, M. (1984). The Concept of Local Development: A Stages Model of Endogenous Regional Growth*. (Papers in Regional Science),55(1), 1-12.
- _____. (1985). Local development: conceptual bases and policy implications. *Regional studies*, 19 (2), 85-93.
- Koperasi. D., & Tegah, U.P.J. (2016). Keragaan Koperasi Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2015.
- Glasson, J. (1990). Pengantar Perencanaan Regional. *FE UI, Jakarta*.
- Jan, N. P. (2001). Development Theory Deconstruction or Reconstructions. *Sage Publications, London*.
- Jarr, J. B. (2001). On The Regional Dimensions of Rostow's Theory of Growth. (*The Applied Regional Science Conference*), *RURDS Vol. 13, No. 1, March 2001*.
- Jhingan, M. L. (2000). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Edisi Keenam. Diterjemahkan oleh: D. Guritno. Rajawali Press Sadono.
- Nemes, G. (2005). *Integrated rural development-The concept and its operation* (No. 0506). Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences.
- Oktavilia, S. (2011). Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal sebagai Upaya Mengantisipasi Disparitas Pendapatan antar Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Posding SNaPP2011: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora. ISSN 2089-3590*.
- Pambudi, A. T. (2010). Pergeseran Struktur Perekonomian Atas Dasar Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi (Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro)*.
- Pratikno, H. (2005). Analisis Potensi dan Kebutuhan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, (Nomor 2), Tahun 10, Hal. 505-524*.
- Prawira, Y., & Wahyu H. (2013). Transformasi Struktur Ekonomi Kabupaten Siak Tahun 2001 -2010. *Jurnal Ekonomi. Vol. 21,(No. 1), Maret 2013*
- Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Growth: A Non-communist Manifesto*. Cambridge University Press.
- Sjafrizal. (2008) Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. *Baduose Media, Sumatra Barat*.
- Statistik, B.P. (2001). Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2000. Badan Pusat Statistik. Provinsi Jawa Tengah.
- Statistik, B.P. (2011). Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2010. Badan Pusat Statistik. Provinsi Jawa Tengah.
- Robinson, T. (2006). Ekonomi Regional. *Teori dan Aplikasi, Jakarta, Bumi*.
- Tikson, D. T. (2005). Administrasi Pembangunan. *Alfabeta, Bandung*.
- Todaro, M. P., & Stephen C. S. (2008). Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi Kesembilan. *Erlangga, Jakarta*.
- Widyaningsih, N. S. (2001). Relevansi Preferensi Penduduk terhadap Fasilitas Kota yang Mempengaruhi Faktor Pembangunan Kota. *Teknik PWK (Plannit Journal) No.2 Th I, Juli – Agustus 2001, hal. 33*.